DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM RESOLUSI KONFLIK SEPARATISME ACEH DAN PAPUA

Dilla Janu Istanti¹, Anita Febriani², Netty Ariani³

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: dillajanu1991@gmail.com

ABSTRAK

Konflik separatisme di Indonesia pernah terjadi di Aceh dan hingga kini masih terus berkejolak di Papua. Konflik separatisme masuk ke dalam vertical conflict yang melibatkan negara dengan kelompok separatisme yang melakukan pemberontakan. Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Kerusuhan di Papua juga terjadi akibat pemberontakan oleh kelompok-kelompok separatisme bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan sistem desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris memberlakukan kewenangan khusus pada daerah-daerah tertentu karena dianggap dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana desentralisasi asimetris memberikan pengaruh dalam penyelesaian konflik separatisme di Aceh dan Papua.

Kata Kunci: *Desentralisasi asimetris*

ABSTRACT

Separatist conflicts in Indonesia have occurred in Aceh and are still volatile in Papua. The separatist conflict has entered into a vertical conflict involving the state and separatist groups carrying out rebellions. Rebellions in Aceh were instigated by the Free Aceh Movement (GAM) to gain independence from Indonesia between 1976 and 2005. Riots in Papua also occurred as a result of rebellions by armed separatist groups, the Free Papua Organization (OPM). Various steps have been taken by the government to resolve the conflict. One of the ways that the government has done is by implementing an asymmetric decentralization system. Asymmetric decentralization imposes special powers on certain regions because it is considered to be an alternative to solve problems in the relationship between the central government and local governments. This paper aims to examine the extent to which asymmetric decentralization has had an effect on resolving separatist conflicts in Aceh and Papua.

Keywords: *Asymmetric decentralization*

PENDAHULUAN

Konflik merupakan gejala dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah “*everyday to life*” (Suryadi, 2007:76). Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini berarti tidak ada individu atau masyarakat tanpa konflik. Ralf Dahrendorf dalam Kantaprawira dan Leo (2007:49) menyatakan bahwa konflik merupakan akibat dari proses integrasi di dalam masyarakat yang tidak tuntas. Dahrendorf mengatakan bahwa, konflik merupakan sebuah gejala penyakit sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun dalam Susan (2014: 20) kelompok sosial dalam struktur sosial pada masyarakat dunia manapun akan memberi kontribusi terhadap berbagai konflik yang terjadi. Konflik akan terus terjadi karena dipengaruhi oleh sifat asal manusia yang dinamakan dengan nafsu. Nafsu memberikan dorongan kepada berbagai kelompok sosial melahirkan berbagai kegiatan untuk memenangi (*to win*) dan menguasai (*to rule*).

Konflik dapat muncul dalam skala yang berbeda-beda seperti konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*), dan konflik antar negara (*interstate conflict*) yang terjadi di dalam tatanan sosial (Susan, 2009 : xxiv). Konflik separatisme masuk ke dalam *vertical conflict* yang melibatkan negara dengan kelompok separatisme yang melakukan

pemberontakan. Konflik separatisme di Indonesia pernah terjadi di Aceh dan hingga kini masih terus terjadi dan bergejolak di Papua. Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Kerusuhan di Papua juga terjadi akibat pemberontakan oleh kelompok-kelompok separatisme bersenjata OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pada tahun 2019 Konflik di Papua sempat tereskalasi dalam skala yang lebih besar hingga terjadi kerusuhan di banyak tempat saat terjadi penghinaan yang dianggap rasis yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Kejadian ini menjadi pemicu merebaknya pergolakan di banyak tempat di Papua. Konflik Papua hingga kini masih sering bergejolak. Konflik separatisme dapat menjadi konflik yang sifatnya destruktif jika tidak ditangani secara serius. Konflik separatisme ini memerlukan peranan pemerintah dalam upaya melakukan manajemen konflik agar tidak merusak tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat. Desentralisasi asimetris menjadi salah satu alternatif yang dipilih dalam resolusi konflik yang terjadi di Aceh dan Papua.

Desentralisasi asimetris merupakan bagian dari politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistik dan seragam menuju kepada desentralisasi yang lebih menghargai keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi.

Desentralisasi asimetris menerapkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menghormati keberagaman daerah. Desentralisasi asimetris memberlakukan kewenangan khusus pada daerah-daerah tertentu karena dianggap dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi asimetris diatur dalam perundang-undangan Pasal 18A UUD Tahun 1945 . pasal tersebut menyatakan beberapa point, yaitu: hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang *dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah* dan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 18A UUD 1945 tersebut dapat dipahami bahwa desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan pada setiap daerah. Desentralisasi asimetris

dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu Negara (Hamzah Bonso, 2019:37)

Konsep desentralisasi tersebut sudah dijalankan dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu dengan adanya beberapa daerah yang berstatus istimewa/berotonomi khusus seperti Provinsi Papua & Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima provinsi ini secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di luar ketentuan umum dan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. (Gunawan A. Tauda, 2018:3) Melalui desentralisasi asimetris tersebut diharapkan dapat menggali potensi yang ada pada daerah dengan keistimewaan tertentu dan juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam melakukan manajemen konflik pada daerah-daerah tertentu.

Studi sebelumnya diantaranya studi Fatimah (2011:7) tentang resolusi konflik dan gerakan separatisme GAM di Aceh. Studi ini memaparkan tentang peran organisasi CMI sebagai mediator dalam menangani konflik GAM dengan

pemerintah Indonesia. Studi lain juga pernah dilakukan oleh Iqbal (2014: 153) tentang Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. Penelitian ini secara umum menganalisis persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh usai perdamaian. Kekerasan yang terjadi pasca perdamaian adalah kekerasan politik. Penelitian ini menegaskan bahwa perdamaian konflik kekerasan yang terjadi antara GAM dengan pemerintah Indonesia memang telah berhasil disepakati tetapi faktanya usai perdamaian kekerasan masih terus berlanjut dan meningkat ketika proses demokrasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya faktor ekonomi, pembagian dana reintegrasi yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada mantan kombatan GAM tidak merata; masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM, setiap peringatan perdamaian Helsinki korban-korban pelanggaran HAM selalu menuntut kepada pemerintah Aceh agar pelanggaran HAM ini diselesaikan; dan lemahnya penegakan hukum di Aceh. Studi lain juga dilakukan Syarief (2017 :163) melalui model pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan konflik dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Model pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan bertani lebih produktif, bertani dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar serta upaya pengembangan usaha melalui kemitraan, dengan pemerintah, perusahaan, dan lembaga keagamaan.

Studi ini juga menganggap bahwa selama penyelesaian konflik yang dilakukan di Papua selama ini masih menggunakan pendekatan represif.

Literatur review diatas memberikan gambaran bahwa studi tentang resolusi konflik sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini akan melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang resolusi konflik yang terjadi di aceh dan papua melalui jalan desentralisasi asimetris yang telah diterapkan oleh pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana desentralisasi asimetris memberikan pengaruh dalam penyelesaian konflik separatisme di Aceh dan Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Praktik desentralisasi yang berbeda atas satu daerah dengan beberapa daerah lain merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pola relasi ini lazim terjadi dalam negara kesatuan. Desentralisasi sendiri sudah berlangsung di wilayah Indonesia sejak lama. Hal tersebut bertujuan untuk pengaturan administratif dalam hal pemaksimalan potensi tiap daerah. Pada masa Orde Baru desentralisasi asimetris sudah diberlakukan, tetapi tidak memberikan perkembangan yang cukup berarti hingga tuntutan desentralisasi asimetris menguat pada masa reformasi.

Diskursus desentralisasi asimetris tak hanya cukup dilihat mundur ke belakang pada kisaran tahun 2001 pada saat UU 22/1999 diberlakukan, tetapi harus melihat secara lebih menyeluruh serangkaian proses desentralisasi. Walaupun 2001 merupakan momen penting desentralisasi di Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat-daerah yang panjang yang dimulai pada 23 Juli 1903 (Cornelis, dikutip dalam Kurniadi, 2012:2)

Penelitian yang dilakukan oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM 2010 dalam Kurniadi (2012:8) menunjukkan setidaknya terdapat lima alasan mengapa desentralisasi asimetris harus dilakukan di Indonesia, yaitu: alasan konflik dan tuntutan separatisme, alasan ibukota Negara, alasan sejarah dan budaya, alasan perbatasan dan alasan pusat pengembangan ekonomi. Analisis pada pembahasan ini akan difokuskan pada desentralisasi asimetris provinsi dengan latar belakang konflik yang kerap terjadi pada provinsi tersebut. Diantaranya ialah provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Papua dan Papua Barat cenderung memiliki persamaan. desentralisasi asimetris dikaji dengan menganalisa daerah yang dilatarbelakangi terjadinya konflik berkepanjangan sehingga diterapkan sistem desentralisasi asimetris.

Desentralisasi diterapkan karena adanya konflik separatisme oleh kelompok-kelompok bersenjata. Aceh

dan Papua mendapatkan perlakuan khusus melalui desentralisasi asimetris karena konflik yang terjadi pada kedua daerah tersebut dengan pemerintah pusat. Konflik tersebut merupakan konflik separatisme atas perebutan sumber daya. Desentralisasi asimetris untuk Aceh dan Papua secara prinsip diwujudkan melalui beberapa hal, diantaranya ialah pemberian dana otonomi khusus sebagai kompensasi ketiga provinsi masih dapat bergabung di Republik Indonesia. Pengakuan terhadap identitas lokal yang terwujud dalam institusi politik. Di Aceh proses ini ditandai dengan adanya lembaga baru yang merepresentasikan adat dan agama. Di Papua, wewenang diberikan kepada adat dan gereja. Pengakuan terhadap simbol-simbol lokal seperti bendera, bahasa dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan partai politik lokal. Aceh memanfaatkan momentum partai lokal dengan tumbuhnya partai lokal dan memenangkan pemilu, sedangkan di Papua belum ada walaupun ruang untuk hal tersebut telah ada. Adanya *afirmatif action* untuk menjadi pemimpin lokal. Di Aceh wujudnya dengan dapat membaca Al-Quran, di Papua pemimpinnya harus orang asli Papua yang disahkan oleh Majelis Rakyat Papua. Pengaturan terkait sumber daya. Selain dana otsus yang jumlahnya sangat besar, pengelolaan sumberdaya daerah adalah isu yang spesifik. Aceh memiliki beberapa kekhususan spesifik terkait dengan pengelolaan sumber daya,

misalnya pertanahan, hutan dan eksploitasi minyak.

Desentralisasi Asimetris Aceh

Pemberlakuan desentralisasi asimetris di Aceh merupakan jawaban dari konflik yang terjadi di Aceh. Konflik Aceh adalah konflik yang terjadi antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik Aceh dipicu oleh berbagai hal, diantaranya adalah karena **ditolakny**

✓ Penolakan Atas Proposal Kebebasan Penerapan Syariat Islam

Masyarakat Aceh sudah pernah mengajukan penerapan syariat islam sejak rezim pemerintahan Soekarno. Hal itu tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan alasan adanya kekhawatiran akan munculnya ketidakadilan jika syariat islam diberlakukan di daerah-daerah tertentu. Alasan lain pada saat itu masyarakat non-muslim dikhawatirkan akan mengalami kondisi ketakutan. Kemudian jika melihat jumlah masyarakat muslim di Indonesia yang mendominasi, dikhawatirkan juga daerah lain akan mengajukan tuntutan yang sama mengikuti Aceh untuk menjalankan syariat Islam di daerahnya. Hal ini yang menjadikan

tuntutan atas penerapan syariat islam ditolak pemerintah pusat.

✓ Faktor Ekonomi

Eksplorasi sumber daya alam terjadi di aceh. Eksploitasi sumber daya alam yang digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional. Sumber daya alam yang dieksploitasi adalah Gas Alam Cair atau LNG (*Liquified Natural Gas*). Pengelolaan sumber daya alam dirasa tidak adil oleh masyarakat aceh. Masyarakat Aceh merasa dirugikan sumber daya alam yang tereksplorasi. Aceh memberikan sumbangsih yang besar kepada negara untuk membantu meningkatkan sektor ekonomi, tapi aceh tidak mendapatkan keuntungan yang setimpal. Sumber daya alam di sana pun juga ikut menipis karena terus menerus dieksploitasi, sementara masyarakat miskin masih banyak dijumpa di Aceh bagian Timur dan Utara.

✓ Hubungan yang tidak sehat dengan Pemerintah Pusat

Aceh cenderung memiliki hubungan yang “tidak sehat” dengan pemerintah pusat pada saat itu. GAM terbentuk karena adanya hubungan yang tidak sehat antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Gerakan seperti ini terbentuk karena pada saat itu diadakannya National Building oleh pemerintahan Ir. Soekarno untuk membentuk identitas bangsa secara nasional. Hal ini sulit diberlakukan di Aceh karena Aceh dinilai memiliki semangat serta kekuatan etnis yang kuat. Hal ini dinilai sebagai ancaman karena dikhawatirkan

dapat menyerang balik Pemerintah Pusat.

Hal-hal yang dijelaskan pada paparan diatas yang akhirnya memicu terjadinya konflik antara Pemerintah Pusat dengan GAM. Masyarakat Aceh melalui GAM melaukan pemberontakan untuk terpenuhinya tuntutan masyarakat Aceh. Tuntutan ini mengancam pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak terjadi nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan GAM.

Tuntutan atas konflik yang terjadi akhirnya dapat dipenuhi melalui perdamaian. Perdamaian itu diwujudkan melalui MOU antara Pemerintah dan GAM yang ditanda tangain di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Masa perdamaian inilah lahir UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan sekaligus mencabut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). UU ini kemudian menjadi dasar rujukan penyelenggaraan otonomi khusus seluas luasnya bagi Aceh pasca reformasi. Merujuk pada regulasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dapat difahami berbagai bentuk asimetris politik Aceh yang termaktub dalam regulasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian, maka didapatkan sebanyak 9 (sembilan) pasal yang memperlihatkan keasimetrisan Aceh dari sisi politiknya.

Tuntutan atas konflik yang terjadi tersebut pada akhirnya terpenuhi dengan dijadikannya Aceh sebagai

daerah istimewa melalui penerapan system desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris menjadi jalan tengah atas konflik separatisme yang ada. Konflik separatisme yang dilakukan oleh GAM pada akhirnya dapat diredam dan berakhir dengan tercapainya kesepakatan antara kelompok separatisme dengan Pemerintah Pusat. Ada 9 keistimewaan Aceh yang termaktub dalam regulasi UU No. 11 tahun 2006.

Desentralisasi Asimetris Papua

Desentralisasi asimetris di Papua salah satunya dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di Papua. Konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatise bersenjata yang menamai gerakannya sebagai OPM (Organisasi Papua Medeka). Konflik separatisme di papua dipicu oleh banyak faktor mulai dari perebutan sumber daya alam, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, hingga kasus yang bernuansa sara.

Hasil peneliti LIPI dalam buku Road Map Papua (2008) berupaya memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyelesaian berbagai konflik yang melanda provinsi tersebut. Pada penelitian tersebut ada empat isu yang dikelompokkan sebagai sumber-sumber konflik papua dalam buku itu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan

untuk pemberdayaan orang asli Papua. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu, diperlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua. Isu ketiga adalah tidak adanya dialog atau negoisasi antara OPM sebagai kelompok separatisme bersenjata dengan Pemerintah. Pemerintah perlu melakukan dialog atau negoisasi dengan kelompok-kelompok pemberontak. Isu keempat adalah pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua. Untuk itu, jalan rekonsiliasi di antara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan-pilihan untuk penegakan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum.

Jika melihat isu pemicu terjadinya konflik di Papua seperti kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Meminjam teori hierarki kebutuhan Maslow melalui Siti Muazaroh dan Subaidi (2019:7) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia memiliki lima tingkatan kebutuhan. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), kebutuhan akan rasa aman (*need for self-securitay*), kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki (*need for love and belongingness*), kebutuhan akan rasa

harga diri (*need for self-esteem*), kebutuhan akan aktualisasi diri (*need for self-actualization*). Jika dianalisa menggunakan teori Maslow, manusia selalu memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Kegagalan pembangunan Papua dibidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menegaskan bahwa kebutuhan fisiologis rakyat Papua belum terpenuhi. Jika kebutuhan yang sangat dasar saja belum terpenuhi maka sangat memungkinkan konflik dapat terpicu terjadi di papua.

Konflik separatisme di Papua dilakukan oleh Organisasi yang menamai gerakan mereka sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963. Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965. Perlawanan itu terus berlangsung hingga saat ini. Tuntutan atas perlawanan ini yaitu pemisah diri Papua dari NKRI.

Sejumlah faktor atau alasan, yang membuat warga Papua ingin melepaskan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Salah satunya, karena warga Papua, merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian ketimpangan antara pusat dan daerah juga membuat kecemburuan sosial masyarakat Papua terus mengkrystal. Hal ini pula, menjadi salah

satu dari sejumlah faktor yang melatarbelakangi lahirnya OPM sebagai bentuk perlawanan atas hal tersebut. **Hasil atau kekayaan alam yang melimpah ruah di wilayah Papua juga menjadi salah satu pemicu konflik.**

Tuntutan atas pemberontakan untuk pemisahan diri dari Indonesia harus segera diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Jalan perundingan dapat dilakukan dengan memenuhi apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Faktor yang menjadi penyebab pecahnya konflik di Papua harus dipetakan secara jelas dan dicari penyelesaiannya. Penyelesaian atas permasalahan harus bersifat kongkrit. Melalui penyelesaian permasalahan secara kongkrit, maka perdamaian di tanah Papua menjadi sebuah keniscayaan.

Penerapan desentralisasi asimetris yang awalnya diharapkan dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian konflik yang terjadi ternyata belum memberikan perkembangan yang berarti. Desentralisasi asimetris bagi Papua ternyata belum juga mampu meredam konflik berkepanjangan yang tengah terjadi. Desentralisasi asimetris belum membuahkan hasil yang signifikan. Pasca diterapkannya desentralisasi asimetris konflik masih banyak terjadi di tanah Papua. Konflik masih terus berkecamuk karena rakyat Papua merasa belum mendapatkan penyelesaian masalah yang berpihak pada kepentingan rakyat Papua oleh

Pemerintah Pusat. Sumber daya alam Papua yang melimpah masih belum mampu mengantarkan rakyat Papua keluar dari jeratan permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan. Desentralisasi asimetris pada kenyataannya belum mampu menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di Papua secara menyeluruh masyarakat dalam bentuk ketidakmampuan mengeluarkan pendapat mengenai keinginan dan harapan mereka.

Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik

Menurut Webster dalam Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin (2004:9), istilah "*conflict*" dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang menjadi "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan". Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin memaknai konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas.

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Konflik menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan pernah terlepas dari konflik, karena manusia hidup bermasyarakat

dan dalam bermasyarakat itu sendiri terdapat struktur yang mengatur sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu tatanan masyarakat yang kompleks. Selain itu, interaksi sosial yang terjadi dalam bermasyarakat juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Kesimpulannya adalah konflik yang terjadi dalam masyarakat disebabkan karena adanya interaksi sosial yang telah dipengaruhi oleh struktur sosial dan terdapat kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing didalamnya serta didominasi oleh pengaruh-pengaruh lain seperti ekonomi, sosial dan sebagainya. Konflik memang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Disisi lain, keberadaan konflik seharusnya memang ada, guna membangun kesatuan yang lebih kokoh dalam suatu kelompok.

Manajemen konflik sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian konflik. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dituntut menguasai manajemen konflik agar konflik yang muncul dapat berdampak positif dan tidak sampai terekskalasi secara besar. Menilik beberapa kasus konflik yang terjadi di Papua dan Aceh hingga diberlakukannya kebijakan desentralisasi asimetris menegaskan bahwa kebijakan ini dalam konteks management konflik adalah sebuah keniscayaan. Menurut Minery (1980:220) pengertian manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, dimana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga

tercapai model yang representatif dan ideal. Dalam hal ini kebijakan desentralisasi asimetris dijadikan model management konflik yang diterapkan oleh pemerintah. Pada praktiknya desentralisasi asimetris belum mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi. Konflik di Papua belum mampu terselesaikan secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengkaji ulang pola desentralisasi asimetris yang lebih tepat dalam penyelesaian konflik di daerah.

KESIMPULAN

Desentralisasi Asimetris telah berlangsung sejak lama di Indonesia. Kesadaran bahwa keragaman-geografis, sosiologis, historis, politik dan budaya yang dimiliki Indonesia dari setiap daerah membuat para pemimpin nasional telah menerapkan konsep otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan kadar yang berbeda-beda. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga tidak disamaratakan secara general penerapannya pada seluruh daerah di dalam suatu negara.

Desentralisasi asimetris menjawab serta mengakomodir kekhususan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan tujuan agar provinsi tersebut berkembang secara pesat sesuai dengan kekhususannya. Salah satu hal yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan desentralisasi asimetris ialah adanya konflik separatisme berkepanjangan di

beberapa provinsi seperti Aceh dan Papua. Dalam konteks ini maka kebijakan desentralisasi asimetris menjadi bagian dari management konflik agar tidak tereksalasi menjadi lebih besar. Berbagai persoalan seperti konflik horizontal di Aceh, pemberlakuan otsus di Papua yang tampak belum memberikan kontribusi berarti dan bahkan konflik dan isu separatisme mengalami eskalasi, seperti yang terjadi saat ini di Papua sebagai alasan yang terjadi di Surabaya padahal hal tersebut hanya trigger dari konflik yang memang ada sejak lama, termasuk konflik lainnya seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah strategis terkait persoalan yang muncul. Maka, sudah seharusnya desentralisasi asimetris menjadi perhatian termasuk komitmen untuk melaksanakannya..

Kebijakan desentralisasi bukan satu-satunya langkah yang dapat dilakukan untuk menangani konflik, tetapi kebijakan ini dapat menjadi alternatif kebijakan yang dapat mendukung meredanya suatu konflik. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris tak lantas mutlak menyelesaikan sebuah konflik secara keseluruhan, karena potret di lapangan juga masih banyak konflik yang terjadi walau kebijakan desentralisasi asimetris ini sudah diterapkan. Sehingga dapat disimpulkan kebijakan desentralisasi asimetris pada beberapa provinsi adalah sebuah keniscayaan dengan beberapa catatan perbaikan dan penyempurnaan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan agar kebijakan desentralisasi asimetris dapat maksimal diterapkan dalam konteks resolusi konflik. **Pertama**, harus ada *political will* dari para elite politik. Kebijakan merupakan produk politik, selalu ada kepentingan dalam sebuah kebijakan. Jika para elite lebih serius dalam menjalankan sebuah kebijakan dengan focus pada kepentingan bersama dan penyelesaian masalah maka kebijakan akan tepat sasaran dan membuahkan hasil yang maksimal. **Kedua**, melakukan penyempurnaan dalam hal regulasi. **Ketiga**, membuka komunikasi pada ruang-ruang publik. Hal ini menjadi penting agar komunikasi tidak mengalami distorsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Ahmad. (2016). *Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas dan Konsensus Simbolik Perda*.
Syariah. Ahkam: XVI (1)
- Cornelis, L. (2009). *Pengembangan Assymetrical Decentralization Sebagai Model Pengelolaan Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin . (2004). *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Iqbal, Muhamad. (2014). *Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca*

- Perjanjian Helsinki*. Jurnal Hubungan Internasional VII (2).
- JPP-UGM (2012). *Desentralisasi Asimetris yang Mensejahterakan: Aceh dan Papua*. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Kantaprawira, Rusadi dan Leo. (2007). *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniadi, Bayu Dardias. (2012). *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Minnery, John R. (1985). *Conflict management in urban planning*. England: Gower Publishing Company Limited
- Saprianingsih, Fatimah. (2011). *Resolusi Konflik dan Gerakan Separatisme GAM di Aceh*. Skripsi. FISIP. Ilmu Politik, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Siti Muazaroh, Subaidi. (2019). *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow*. Al-Mazahib 7 (1)
- Suryadi, Budi. (2007). *Sosiologi Politik: Sejarah Definisi dan Perkembangan Konsep*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Syarief, Rizal. (2017). *Pengembangan Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Konflik Timika Papua*. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 22 (3)
- Tauda, Gunaan. (2018). *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Administrative Law & Governance Journal* (1) 4
- Hamjah Bonso. (2019). *Efektivitas Network Governance dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Provinsi Papua*. Jawa Timur: Qiara Media
- Gunawan A. Tauda. (2018). *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (4) 1
- Buku *Road Map Papua*. Diakses dari <http://lipi.go.id/risetunggulan/singgle/buku-road-map-papua>/Diakses tgl 23 September 2019 pkl. 10.38 wib.
- Cnn Indonesia. (2019). *Tersangka Rasisme di Surabaya Minta Maaf kepada Warga Papua* diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903164442-20-427216/tersangka-rasisme-di-surabaya-minta-maaf-kepada-warga-papua> pada 12 November 2019 Pkl.11.35 Wib.

- Kompas.com. (2019). *Kerusuhan di Papua, Apa yang Terjadi di Manokwari hingga Jayapura?*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura?page=all> pada 12 November 2019, Pkl. 11.42 Wib.
- Nivada, Aryos. (2017). *Desentralisasi Politik : Aceh dan Papua*. Diakses dari <http://www.imparsial.org/publikasi/opini/desentralisasi-asimetris-politik-aceh-dan-papua/> pada 23 September 2019, Pkl. 20.27 wib.
- Hukamnas.com. (2017). *3 Penyebab Konflik Aceh Paling Sering Terjadi*. Diakses dari <https://hukamnas.com/penyebab-konflik-aceh> pada 16 Oktober 2019, Pk. 16.14 WIB.
- Wikipedia.org. (2019). *Pemberontakan di Aceh*. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan di Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh) pada 07 Maret 2020, pkl 11.14 WIB.